

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Struktur Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya sehingga peneniliti dapat menarik kesimpulan dari Dampak

1. Fungsi Belanja Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja ekonomi maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di jelaskan secara nyata.
2. Fungsi Belanja Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja kesehatan maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di jelaskan secara nyata.
3. Fungsi Belanja Ketertiban dan Keamanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja ketertiban dan keamanan maka tidak secara langsung menurunkan kemiskinan.
4. Fungsi Belanja Lingkungan Hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja lingkungan hidup maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di jelaskan secara nyata.

5. Fungsi Belanja Parawisata dan Budaya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja parawisata dan budaya maka tidak secara langsung menurunkan kemiskinan.
6. Fungsi Belanja Pelayanan Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja pelayanan umum maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di jelaskan secara nyata.
7. Fungsi Belanja Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja pendidikan maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di jelaskan secara nyata.
8. Fungsi Belanja Perlindungan Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja perlindungan sosial maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di jelaskan secara nyata.
9. Fungsi Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kemiskinan. Artinya setiap peningkatan fungsi belanja perumahan dan fasilitas umum maka akan meningkatkan kemiskinan dan dapat di jelaskan secara nyata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan kesimpulan bahwa belanja fungsi ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, itu artinya secara tidak langsung dapat meningkatkan kemiskinan dikarenakan beberapa faktor. Diharapkan pemerintah harusnya lebih memperhatikan anggaran ini sudah direalisasikan sesuai dan tetap sasaran. Mengingat belanja ekonomi banyak dipergunakan untuk biaya-biaya program sarana dan prasarana, transportasi, pertanian, dan program ekonomi lainnya yang seharusnya diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
- 2 Belanja fungsi kesehatan tidak dapat mengurangi kemiskinan, dilihat dari penelitian yang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Biaya kesehatan bagi orang berpenghasilan tinggi mungkin dianggap murah, tetapi untuk kalangan menengah kebawah malah sebaliknya. Jadi pemerintah diharapkan lebih mengoptimalkan program-program yang ada, misalkan untuk BPJS kesehatan benar-benar dilihat apakah tepat sasaran penyalurannya dimasyarakat dan pelayanannya juga diperhatikan. Karena secara logis orang sakit tidak bisa bekerja, itu artinya tidak berpenghasilan dan dapat meningkatkan kemiskinan. Fungsi kesehatan sendiri digunakan untuk membiayai
- 3 Dari hasil penelitian belanja fungsi ketertiban dan keamanan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, itu artinya kemiskinan menurun. Di karenakan pemerintah memfokuskan pada program yang ada. Untuk itu pemerintah diharapkan lebih mengoptimalkan anggaran yang ada dengan menambah program-program baru.

- 4 Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi belanja lingkungan hidup berpengaruh positif terhadap kemiskinan dimana fungsi belanja lingkungan dapat meningkatkan kemiskinan. Dikarenakan tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang sehat akan membuat badan sehat. Seseorang dapat menghasilkan uang ketika bekerja. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah bagaimana menumbuhkan kesadaran pada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Dengan adanya anggaran belanja fungsi lingkungan hidup mampu menjadikan lingkungan bersih, nyaman, misalkan dengan membangun taman, atau menaikkan upah bagi pekerja kebersihan lingkungan.
- 4 Melihat secara umum output belanja pariwisata dan budaya menjadi kontribusi yang baik bagi daerah dan nasional. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata menciptakan pendapatan bagi masyarakat dan daerah seperti pengeluaran pariwisata yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pariwisata seperti hotel, restoran, biro perjalanan, dan pemandu wisata. Hal tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian dimana belanja pariwisata dan budaya menghasilkan hasil yang negatif. Tentunya sangat baik dimana dapat menurunkan kemiskinan, sehingga kedepannya bagi pemerintah daerah dan pusat lebih meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan mendorong lebih banyak daya tarik bagi wisatawan. Yang pada akhirnya pendapatan pariwisata dapat menciptakan struktur ekonomi yang lebih baik, pada gilirannya dapat merangsang perekonomian masyarakat dan daerah.

- 5 Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pelayanan umum berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dimana pemerintah mengalokasikan anggaran lebih terpusat pada belanja pengadaan pelayanan umum yang pada kenyataannya output yang dihasilkan dari kegiatan ini tidak cukup baik yang dapat menambah kemiskinan yang sedang terjadi. Sehingga pemerintah perlu lebih jeli dalam pengambilan keputusan kebijakan dimana output kebijakan yang dihasilkan harusnya mengurangi kemiskinan.
- 6 Berdasar pada penelitian ini belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Fenomena ini dapat disebabkan karena, sulitnya bagi masyarakat miskin untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi yang biasanya dikaitkan dengan kurangnya biaya, sementara gelar sarjana sering dipersyaratkan untuk beberapa bidang pekerjaan dan banyak lulusan sarjana memilih untuk tidak mencari pekerjaan karena pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan keahliannya atau penghasilan yang tidak sesuai dengan harapan. Pada akhirnya tugas dan peran dari pemerintahlah dalam meningkatkan sumber daya manusia, meninjau kembali apakah anggaran yang dialokasikan untuk belanja pendidikan tetap sasaran, memberantas pengli yang terjadi didunia pendidikan dan kebijakan lainnya perlu diperhatikan.
- 7 Secara fungsi belanja perlindungan sosial hanya penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin tidak untuk mengurangi dan membrantas kemiskinan. Dari kacamata penulis dalam melihat problematika kegiatan tersebut alangkah baiknya sebagian

anggaran yang begitu besar dialokasikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, bantuan apresiasi terhadap kekayaan intelektual, mendorong UMKM go internasional dan sebagainya.

- 8 Belanja sektor perumahan dan fasilitas umum berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh buruknya kualitas infrastruktur umum dan banyaknya pemukiman kumuh, yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah perlu meringankan biaya perumahan dan mengurangi biaya fasilitas umum serta memperbaiki fasilitas dan pemetaan wilayah yang lebih baik dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhamad, Farhana Muhamad, Huzain Jailani, Muhammad Satrizal Azmi. 2020. *Pengaruh belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten lombok timur tahun 2010-2018.*, Lombok Timur : Published.
- Badan Pusat Statistik, 2020. Kemiskinan.
- Badan Pusat Statistik (2014-2019) *Data Kemsikinan Provinsi Gorontalo*
- Badan Pusat Statistik (2014-2019) *Data Kemsikinan Provinsi Sulawesi Barat*
- Badan Pusat Statistik (2014-2019) *Data Kemsikinan Provinsi Sulawesi Utara*
- Badan Pusat Statistik (2014-2019) *Data Kemsikinan Provinsi Sulawesi Selatan*
- Badan Pusat Statistik (2014-2019) *Data Kemsikinan Provinsi Sulawesi Tengah*
- Badan Pusat Statistik (2014-2019) *Statistik keuangan daerah*
- Dr.Subandi, M.M. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Jouzar Fahouq Ishaq. 2017. *Pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Volume 17: 55-59
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UUP STIM YKPN. Yokyakarta
- Paat, D. C., Koleangan, R. A., & Rimate, V. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(1).
- Pasaribu, Y., & HENDARTO, R. M. (2016). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2013 (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Pratama, Nengah Rai Narka Suda, dkk. 2019. *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan inventasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan Di Kabupaten/kota Provinsi Bali*.
- Rambe, Roosemarina Anggraini, dkk. 2020. *Kemampuan belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan : Bukti empiris. sumatera dan Jawa*. The Journal Of Economic Development.

- Ratnadi, Ni Made Dwi. Dkk. 2016. Analisis pengaruh belanja langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di Provinsi Bali. Udayana. Volume 2, No, 3 (Hal. 49.59).
- Ritonga, 2003. *Kemiskinan dan Pembangunan Manusia*. Badan Pusat Statistik
- Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 11–28. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.235>
- Bappenas. (2017). Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Ri 2015-2019. 1–198.
- Dharmmayukti, B., Rotinsulu, T. O., & Niode, A. O. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(5).
- Gujarati, Damodar Dan Porter, Dawn C. 2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Ed : 5 Jakarta; Salemba Empat.
- Hermawan, W. (2017) Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat Untuk Fungsi Lingkungan Hidup Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif*, 6 (1). 1-15
- Hidarini, R, A & Bawono, A, D, B. (2018). Seminar Nasional Dan Call For Paper Sebagai Variabel Moderating Terhadap Hubungan Ruang Fiskal Dengan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) (Studi Empiris Di Seluruh Kabupaten / Kota Di Indonesia Tahun 2018) Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pe. 285–296. [Http://eprint.stieww.ac.id/1110/1/22](http://eprint.stieww.ac.id/1110/1/22) Rolanda Aisha Hidarini Dan Andy Dwi Bayu Bawono.Pdf
- Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 41-53.
- Isminanda, A., & Bawono, A. D. B. (2019). Pengaruh Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Persentase Kemiskinan, Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Fungsi Ekonomi Di Indonesia (Studi Empiris Di Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2018).

Semarang: Stie Bank Bpd Jateng, Pp. 422-443 Isbn 9786027436725.

Kasim, R., Engka, D. S., & Siwu, H. D. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1) 953-963.

Kemenkeu RI, 2021. Alokasi Kontribusi Masyarakat Dalam Belanja Pemerintah Pusat. <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu> (Diakses Pada 27 Desember 2021).

Mapparenta, M., & Arfah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dari Segi Pengeluaran Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Economic Resource*, 2(2), 102-113.

Nakamura, Y. (2020). Poverty Alleviation And Correction Of Income Disparity Through Fiscal Spending On Education. *Poverty & Public Policy*, 12(1), 63-72.

Omari, Lv, & Muturi, W. (2016). Pengaruh Pengeluaran Sektor Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kenya. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 7 (8), 219-242.

Palenewen, T. O., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).

Ramadanti, R. (2021). Pengaruh Kemiskinan Dan Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas Di Indonesia Tahun 2015-2019 (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta).

Ridena, S. (2021). Kemiskinan Dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan Di Perkotaan Dan Perdesaan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5 (1), 39-48.

Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85-96.

Sitanggang, E. (2021). Analisis Pengaruh Pertanian Dan Pariwisata Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten

Samosir. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1(01).

Sukarniati, L., Lubis, F. R. A., & Zakiyyah, N. A. A. (2021). Ekonomi Pembangunan (Teori Dan Tantangan Di Negara Berkembang). Uad Press.

Tiberti, L. (2014). On Growth And Poverty In Uganda Impact Of Increased Public Education Spending On Growth And Poverty In Uganda An Integrated Micro-Macro Approach. (No. 2014-01). Pep-Mpia. (Doi:10.2139/Ssrn.3167435)

Tnp2k. (2015). Buku Panduan, Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data. [Http://Www.Tnp2k.Go.Id/Images/Uploads/Downloads/Final Modul Sesi 1 Advokasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Mempertajam Intervensi Kebijakan-1.Pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/final_modul_sesi_1_advokasi_perencanaan_penanggulangan_kemiskinan_berbasis_data_mempertajam_intervensi_kebijakan-1.pdf).